



LAPORAN LAYANAN INFORMASI

DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

Mei 2026



Transformasi Media Layanan Informasi DJPK

Sejak **16 Juni 2025**, kanal layanan Contact Center DJPK berkonsolidasi dengan kanal layanan Kemenkeu PRIME. Selanjutnya, mulai **20 April 2026**, Contact Center DJPK memasuki tahap *pra-Single Point of Contact* dengan langsung menangani layanan melalui kanal Telepon dan WhatsApp.

16 Juni 2025
Konsolidasi



0811-150-4207



callcenter.djpk
@kemenkeu.go.id



150420



djpk.kemenkeu.g
o.id

MENJADI

20 April 2026
Pra-SPOC



0813-10004-134



kemenkeu.prime@kem
enkeu.go.id



134



kemenkeu-prime.
kemenkeu.go.id

Layanan DJPK yang
Tetap Aktif

Layanan Konsultasi Video
Conference

Melalui Aplikasi Reservasi Layanan Konsultasi Online
(RELASI DJPK)
(jam layanan hari kerja pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB).

Pengelolaan Komunikasi dan Layanan Informasi melalui Kanal Publikasi DJPK



Ringkasan Publikasi dan Layanan Informasi

10

Publikasi Website



4

Webinar/FGD/
Workshop/



101

Publikasi Konten Media
Sosial



18

PPID



6

Blast Whatsapp/
Email



198

Tiket Konsultasi
Kondisi pra *Single Point of
Contact*



34

Email Reservasi
DJPK



15

Video Conference



2

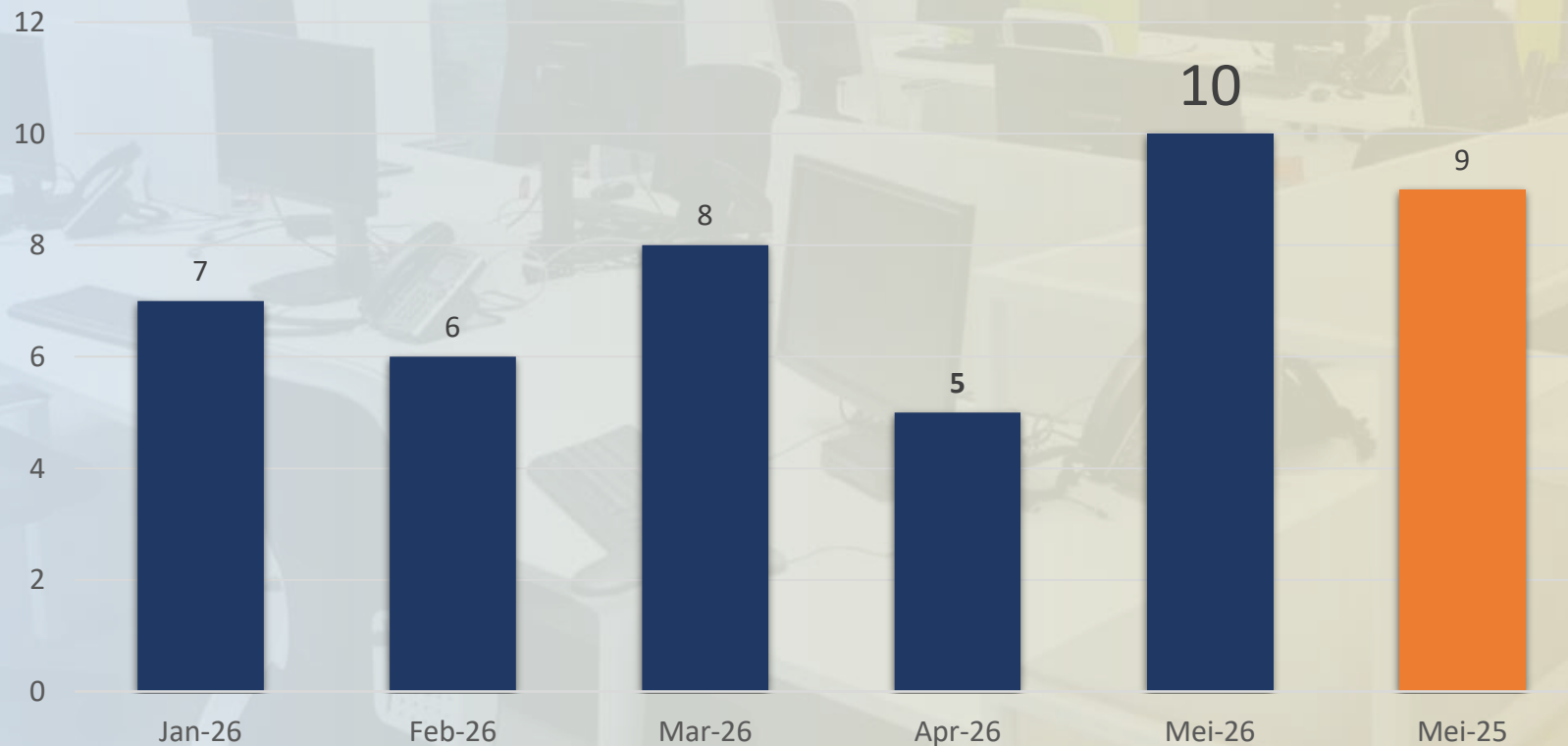
Konsultasi Tatap Muka



Publikasi Website DJPK

Pada Mei 2026, terdapat **10 publikasi** pada *website* DJPK yang terdiri dari peraturan dan konsultasi publik.

Jumlah publikasi Mei 2026 **naik 100%** dibandingkan bulan sebelumnya (5) dan **naik 11%** dibandingkan Mei 2025 (9).



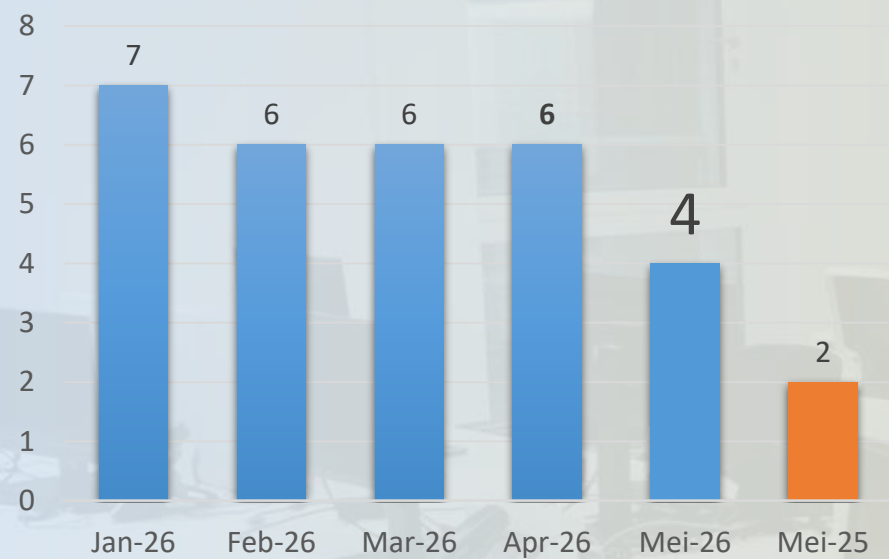
Rincian Publikasi Website



No	Nama Publikasi	Jenis Publikasi
1	Pemberitahuan Informasi Tidak Benar terkait Hibah	Berita
2	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik	Peraturan
3	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok	Peraturan
4	S-48/PK/2026 tentang Penyampaian KEM PPKF Tahun 2027 sebagai Dasar Penyusunan Rancangan KUA PPAS Tahun 2027	Pemberitahuan ke Daerah
5	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2025 tentang Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat	Peraturan
6	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility	Peraturan
7	Mengenal DAU Earmark Kesehatan, Insentif Fiskal Berbasis Kinerja Daerah	Berita
8	Strengthening Intergovernmental Transfers and Subnational Finance for Service Delivery in Indonesia (SINERGIS)	SINERGIS
9	DJPk Dorong Pemerintah Daerah Memanfaatkan Pembiayaan Kreatif	Berita
10	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum	Peraturan

Publikasi Webinar/FGD/Workshop

Perkembangan Publikasi Webinar DJPK



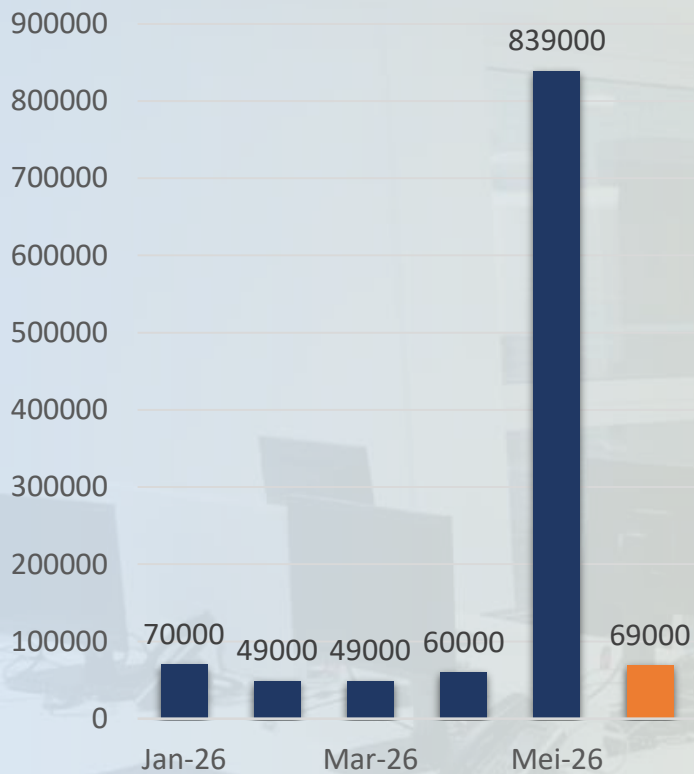
Publikasi webinar Mei 2026 **turun 33%** jika dibandingkan dengan publikasi bulan sebelumnya (6) dan **naik (50%)** jika dibandingkan dengan publikasi Mei 2025 (2).

No	Nama Webinar	Jenis Webinar
1	Penyambutan Mahasiswa Magang PKN STAN	Webinar
2	Pertemuan dengan Gubernur Papua Selatan	FGD
3	Kunjungan Kerja Gub. NTB	FGD
4	Sosialisasi DAK Fisik	Sosialisasi



Kunjungan Website DJPK

Perkembangan Kunjungan Website

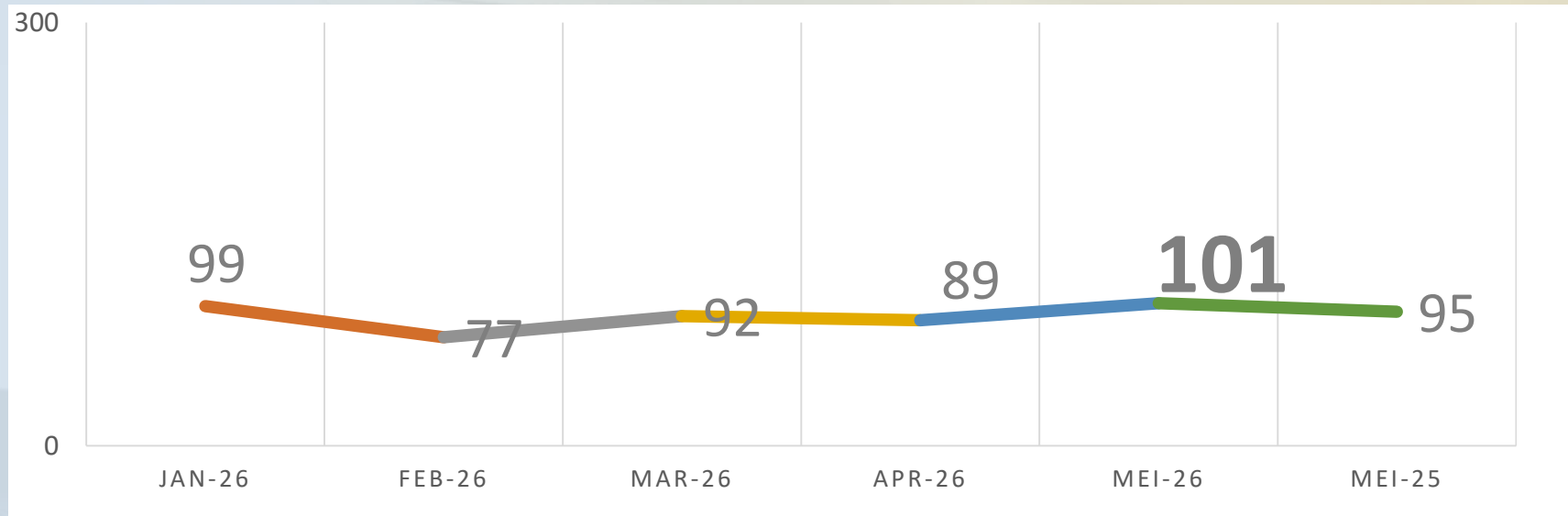


Jumlah pengunjung website DJPK pada Mei 2026 **meningkat sangat signifikan menjadi 839.000 pengunjung**. Secara bulanan, jumlah tersebut **naik 779.000 pengunjung atau sekitar 1.298,33%** dibandingkan April 2026. Sementara dibanding tahun sebelumnya, pengunjung Mei 2026 meningkat 770.000 pengunjung atau sekitar 1.115,94% dibandingkan Mei 2025 (69.000 pengunjung).

Halaman yang paling banyak diakses antara lain

- Portal Data SIKD;
- Data APBD Setelah TA 2006;
- Rincian Dana Desa per Desa TA 2025; dan
- Form *Download* Data APBD.

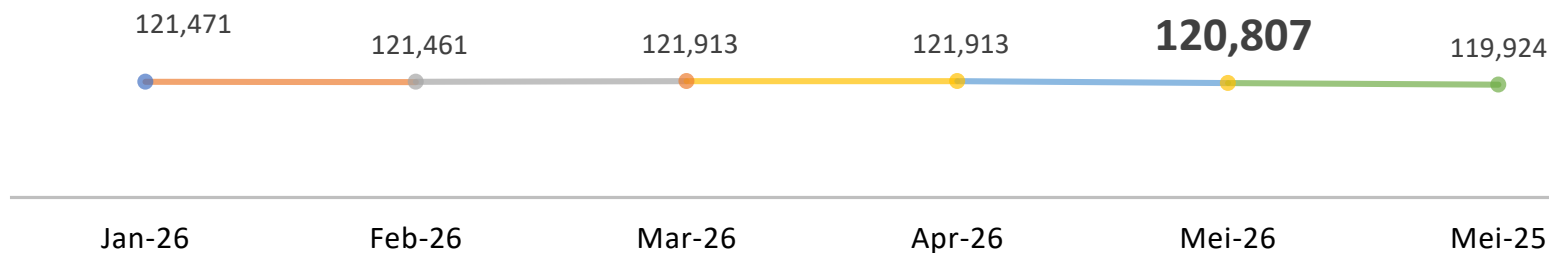
Publikasi Konten Media Sosial DJPK



1. Media Sosial DJPK terdiri dari Instagram (@ditjenpk), Twitter (@DitjenPK), Facebook (DJPK), dan Tiktok (@ditjenpk).
2. Jumlah publikasi konten media sosial DJPK pada Mei 2026 naik 13% dibanding bulan sebelumnya (89). Jika dibandingkan dengan Mei 2025 (95), jumlah publikasi naik 6%.



Grafik Perkembangan Pengikut Instagram



Followers (per 31 Mei)

120.807

Reach (total)

107.870

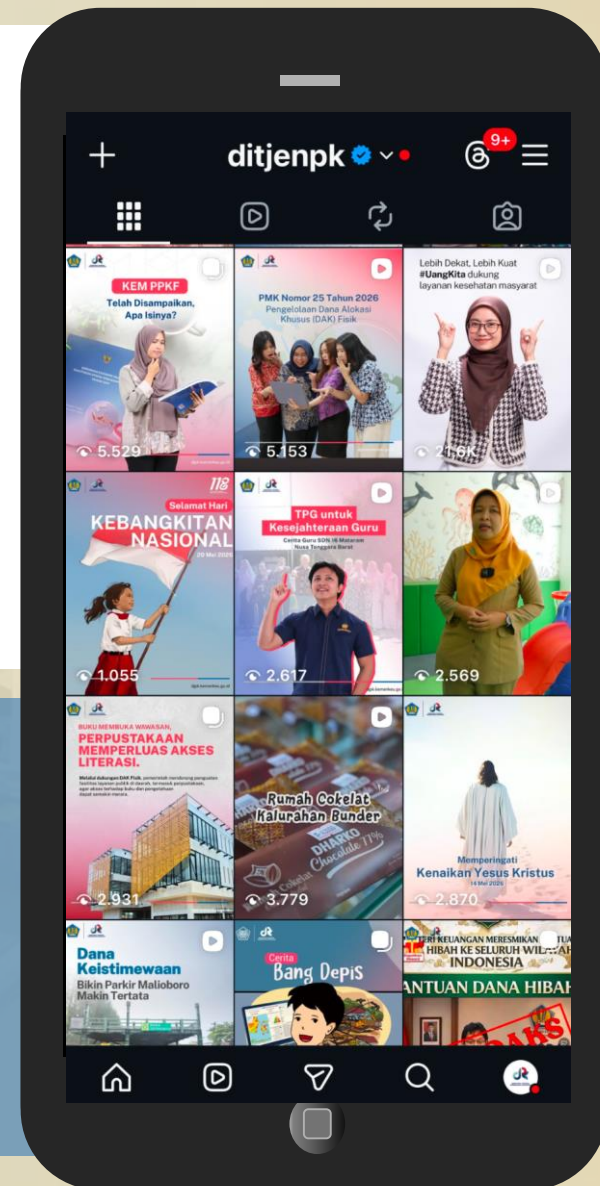
Reach (rata-rata)

4.690

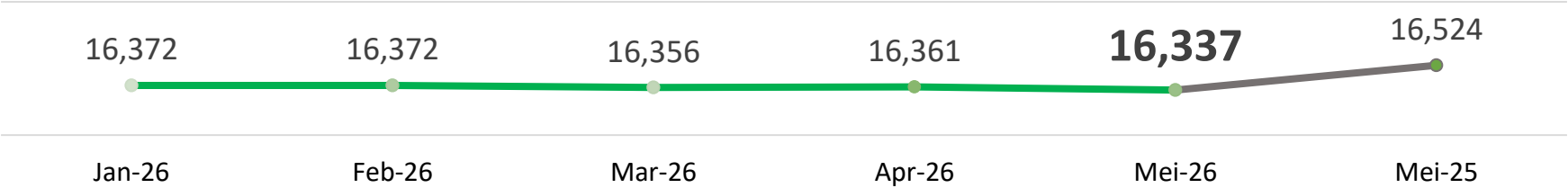
Jumlah Unggahan

24 *feeds*

20 *story*



Grafik Perkembangan Pengikut X (Twitter)

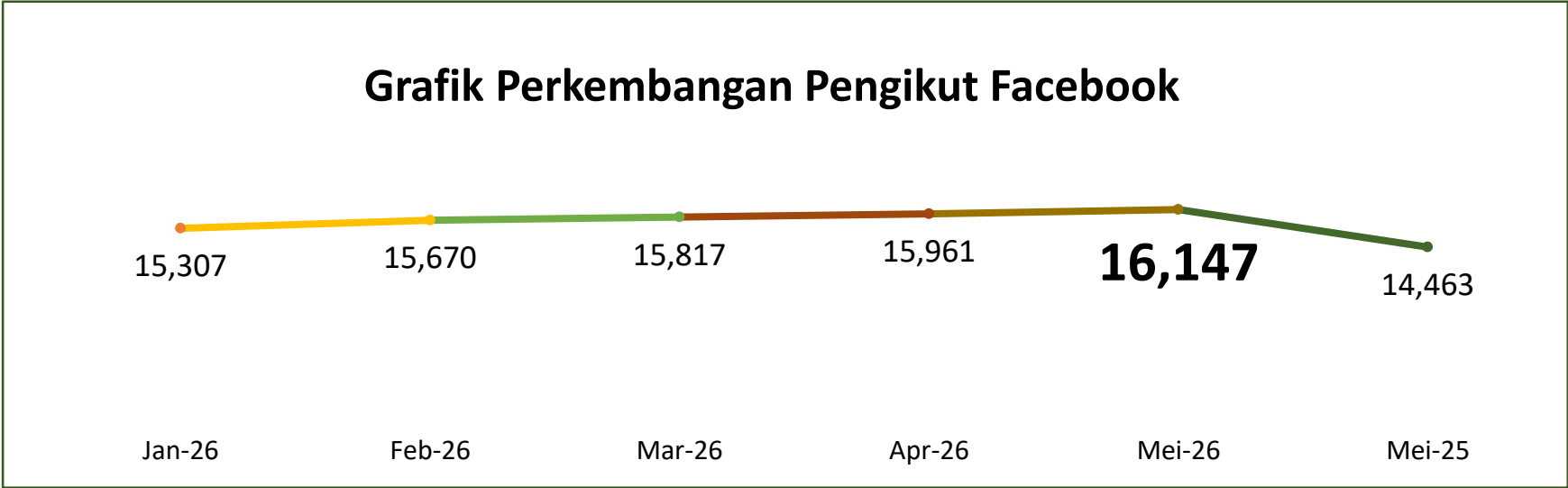


Followers (per 31 Mei)	16.337
Reach (total)	9.015
Reach (rata-rata)	392

Jumlah Konten

30 Konten





Followers (per 31 Mei)	16.147
Total Reach	18.109
Reach (rata-rata)	670

Jumlah Konten

27 Konten



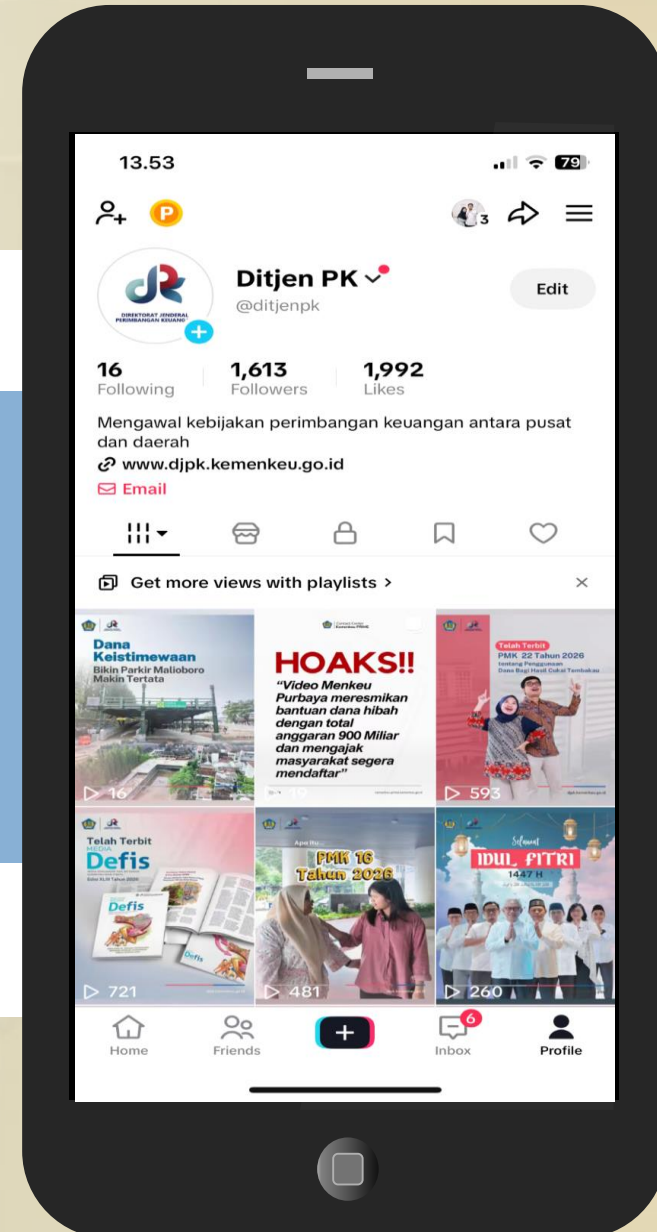
Performa Tiktok

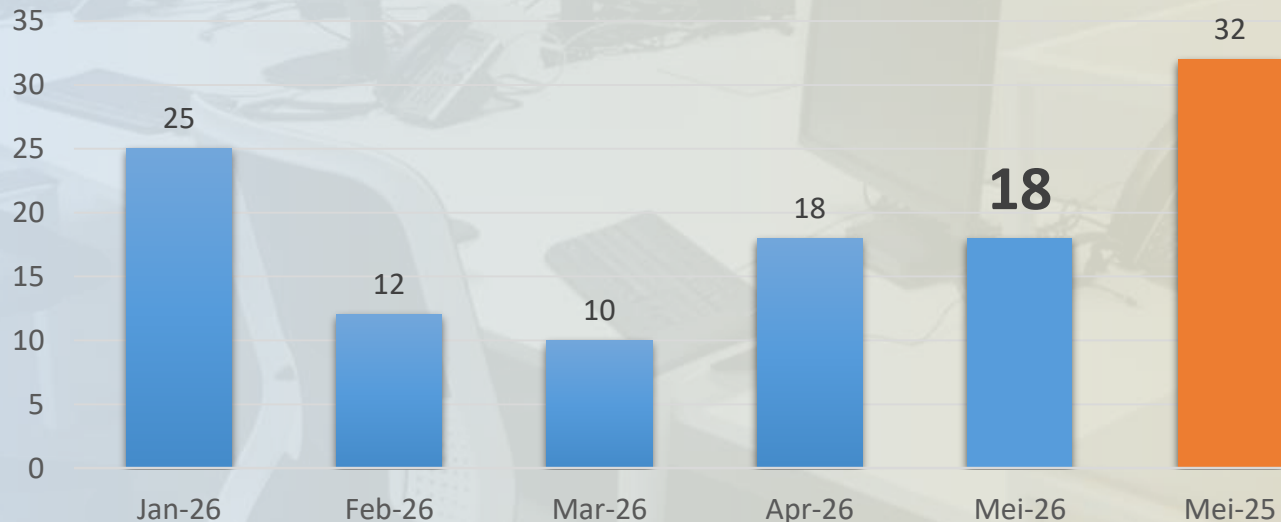
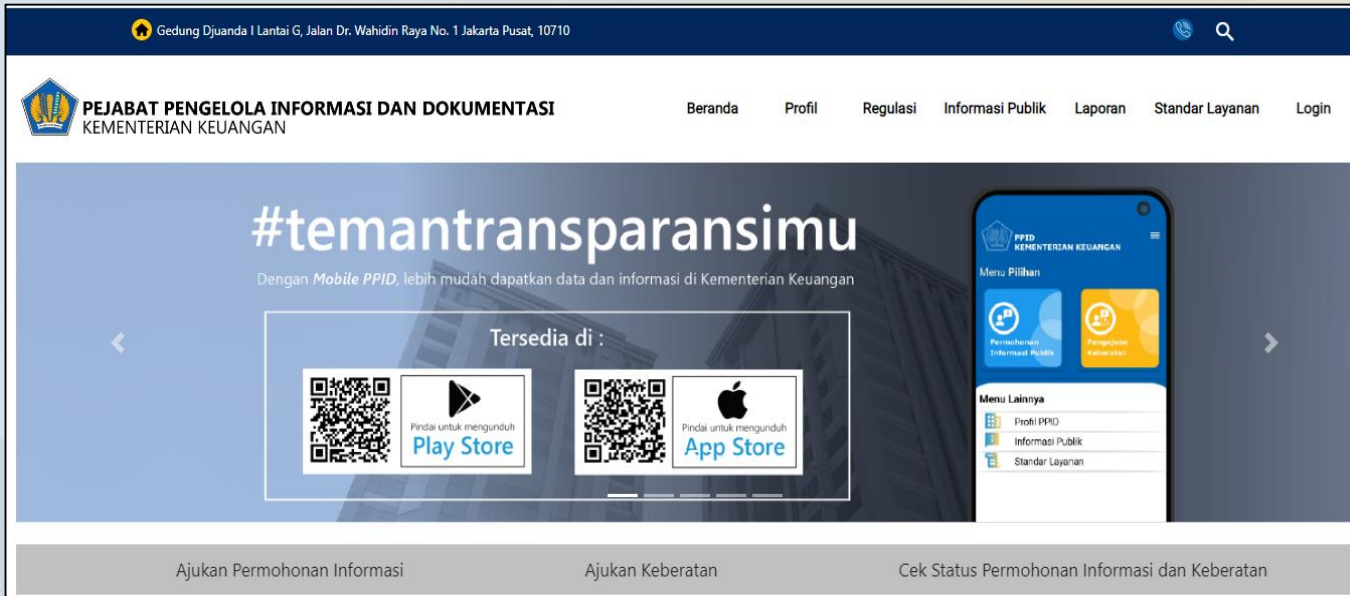
Dalam rangka memperluas cakupan penyebaran informasi, mulai Januari 2026, DJPK menambah 1 akun media sosial: Tiktok @ditjenpk

Followers (per 31 Mei)	1.613
<i>Total Reach</i>	612
<i>Reach (rata-rata)</i>	306

Jumlah Konten

2 Konten





Selain memublikasikan data dan informasi melalui *website* dan media lainnya, DJPK juga melayani permohonan informasi/data melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DJPK. Pada Mei 2026, terdapat **18** permohonan.

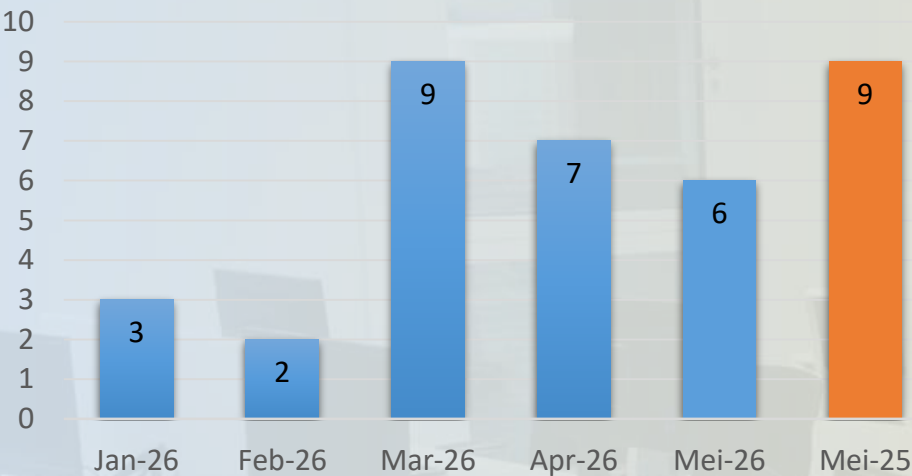
Sebagian besar permintaan data dalam rangka keperluan penelitian. Data yang diminta mencakup:

- Data anggaran dan realisasi APBD
- Data anggaran dan realisasi Transfer ke Daerah

Permohonan data pada Mei 2026 **sama dibanding bulan sebelumnya (18)** dan turun **43%** dibandingkan Mei 2025 (32).

Layanan *Email* dan *WA Blast*

Perkembangan Layanan *Email* dan *WA Blast*



Mulai 16 Juni 2025, layanan distribusi informasi melalui *email* dan *whatsapp blast* dilakukan oleh Kemenkeu PRIME dengan permohonan/korespondensi dari DJPK.

No	Jenis Blast	Nama Blast
1	WhatsApp dan Email	Penyampaian informasi Majalah Defis Edisi XLIII dengan tema “Resiliensi di Tengah Tantangan: Bersama Perkuat Ketahanan Fiskal Daerah 2026”
2	WhatsApp dan Email	Penyampaian Surat Nomor UND-1/PK/PK.3/2026 tanggal 18 Mei 2026
3	WhatsApp dan Email	Penyampaian Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 18/MK/PK/2026
4	WhatsApp dan Email	Penyampaian Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor S-48/PK/2026 hal Penyampaian KEM PPKF Tahun 2027 sebagai Dasar Penyusunan Rancangan KUA PPAS Tahun 2027
5	WhatsApp dan Email	Pemberitahuan Perubahan Jadwal Kegiatan Sosialisasi Antikorupsi dalam rangka Hari Lahir Pancasila
6	WhatsApp dan Email	Penyampaian Surat Nomor UND-17/PK/2026 tanggal 4 Juni 2026



Pengelolaan Komunikasi dan Layanan Informasi melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME



Tiket Konsultasi DJPK

Perkembangan Jumlah Tiket Konsultasi



Mulai 20 April 2026, dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi DJPK, **Contact Center (CC) DJPK melaksanakan layanan Pra-Single Point of Contact (SPOC)** dengan menggunakan 2 akun telepon dan 2 akun whatsapp dari Kemenkeu PRIME.

383

Total tiket pra - SPOC (20 April s.d. 31 Mei)

198

Total tiket layanan Mei

121

WhatsApp (Mei)

61%

64

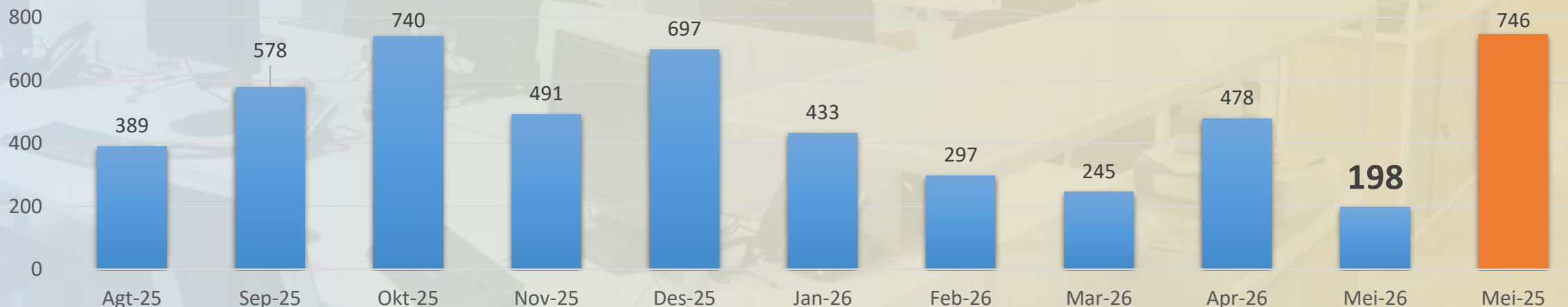
Email (Mei)

32%

13

Telepon (Mei)

7%



Jumlah konsultasi pada bulan Mei tercatat sebanyak 198 layanan, **turun sebesar 58,58% dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 478 layanan**. Penurunan ini dapat disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem *Customer Relationship Management* (CRM).

Rincian Tiket Konsultasi

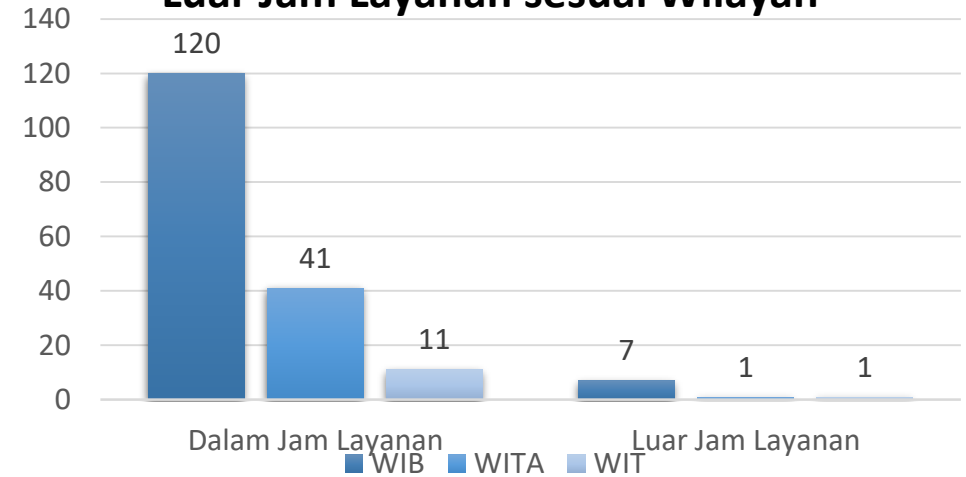
Selama Mei 2026, dari total tiket konsultasi, sebanyak 181 tiket **dapat** diidentifikasi asal zona waktu, sedangkan 17 tiket sisanya **tidak dapat** diidentifikasi.

Dari 181 tiket yang dapat diidentifikasi zona waktunya, 172 pengguna layanan menghubungi DJPK di dalam jam layanan, sedangkan 9 sisanya menghubungi DJPK di luar jam layanan yang terdiri dari:

- 7 (77%) dari bagian barat (WIB);
- 1 (11%) dari bagian tengah (WITA); dan
- 1 (11%) dari bagian timur (WIT).

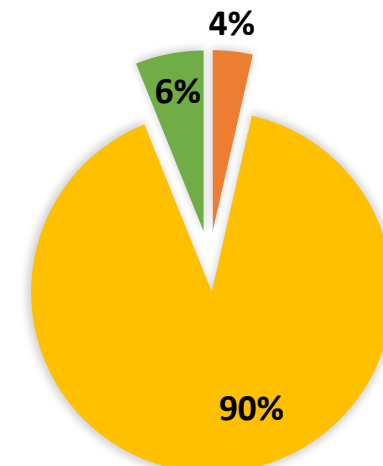
Dari total tiket layanan konsultasi DJPK, sebanyak 7 tiket (4%) ditangani oleh agent L1 Kemenkeu PRIME dan sebanyak 190 (96%) ditangani oleh agent L1 DJPK. Dari 190 tiket tersebut, sebanyak 178 tiket (90%) diselesaikan oleh L1 DJPK dan 12 tiket (6%) diselesaikan oleh *agent* L2 teknis DJPK.

Jumlah Pemda Menghubungi di Dalam dan Luar Jam Layanan sesuai Wilayah



Persentase Penanganan Tiket

■ L1 - BIRO KLI ■ L1 - DJPK ■ L2 - Unit Teknis



Topik Konsultasi Teknis



Dana Alokasi Umum (DAU)

1. Informasi Kebijakan dan Ketentuan Penyaluran DAU Yang Ditentukan Penggunaannya
2. Informasi Kebijakan Tambahan DAU TA 2026 dukungan pendanaan THR dan gaji ketiga belas.

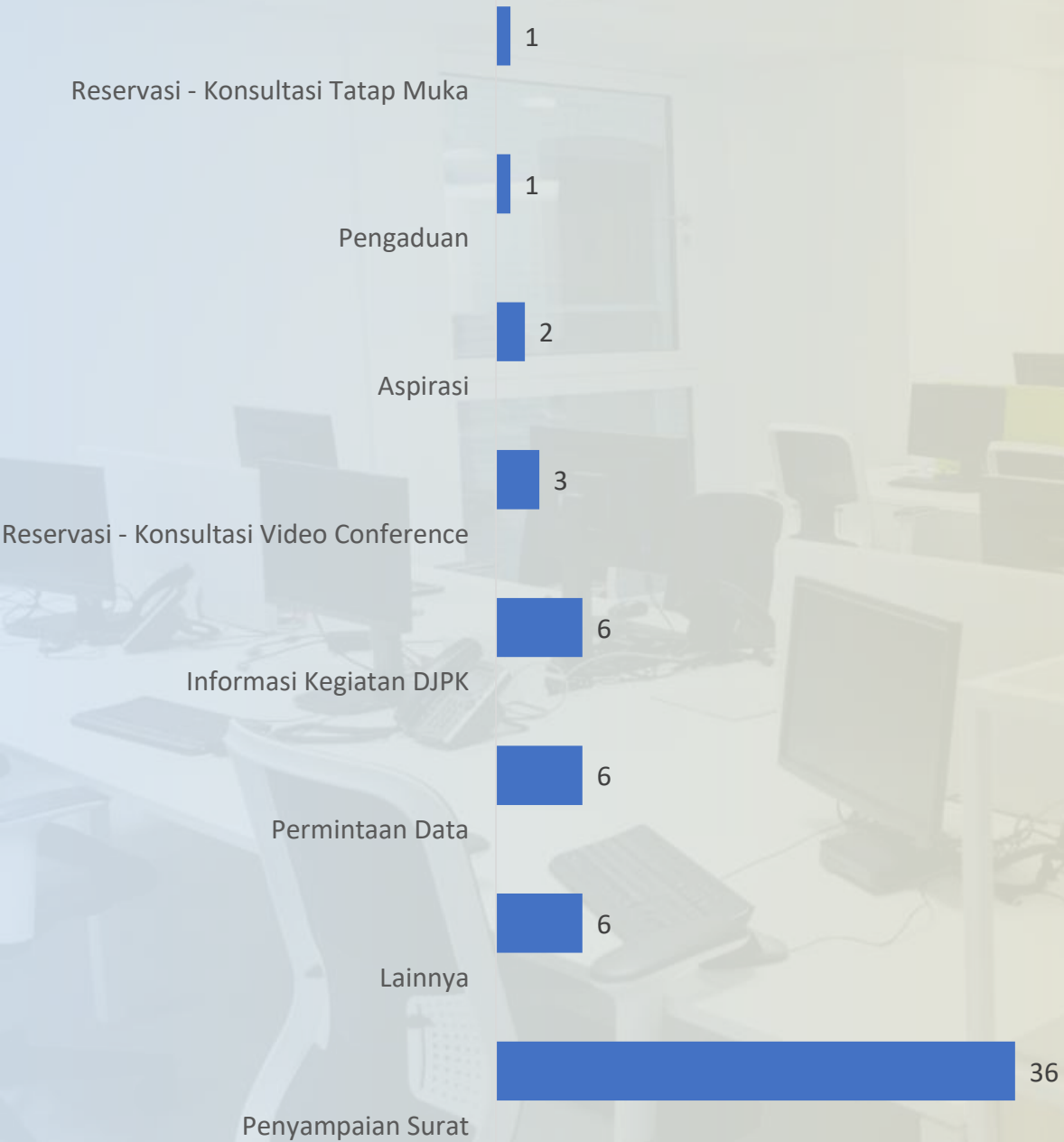
Aplikasi

Kendala penyediaan data dan uraian informasi TKD pada fitur “Lacak Salur” aplikasi SIKD NG.

Dana Alokasi Khusus Nonfisik

1. Pelaporan syarat salur DAK Nonfisik;
2. Penyaluran DAK Nonfisik.

Topik Konsultasi Non-teknis



Surat Masuk

terdiri dari:

- Penyampaian surat masuk dengan tujuan DJPK.
- Konfirmasi tindak lanjut atas surat yang telah disampaikan ke DJPK.

Reservasi

Informasi berkaitan reservasi konsultasi *video conference* dan tatap muka

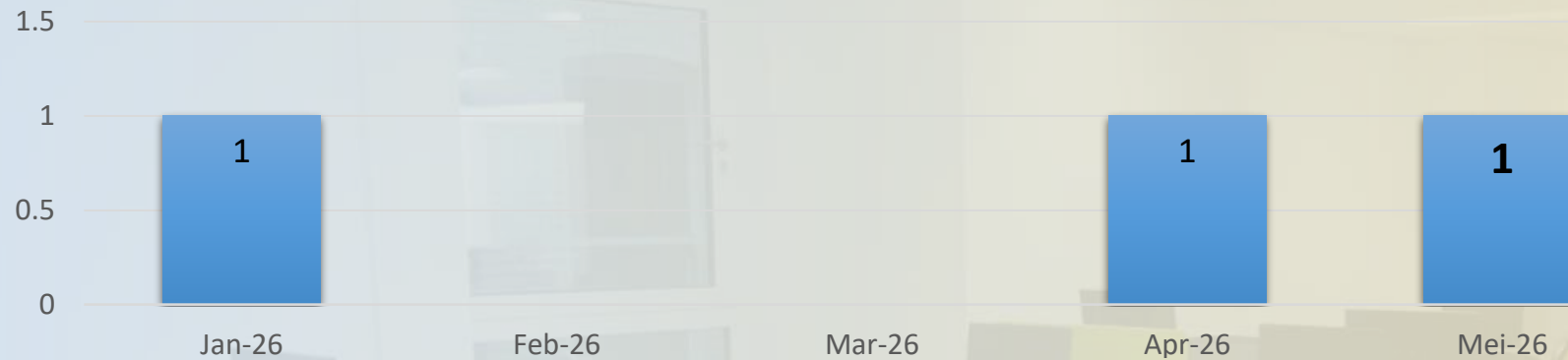
Permintaan Data

- Informasi terkait data yang tersedia dan tidak tersedia pada *website* DJPK.
- Informasi permohonan data melalui PPID.

Lainnya

Informasi berkaitan dengan hal lain selain Surat Masuk, Reservasi, dan Permohonan Data.

Pengaduan/Keluhan/Aspirasi



Keluhan

Pada Mei 2026, **terdapat 1 Aspirasi Kebijakan terkait JFKN di Lingkungan Pemerintah Daerah (Kab. Sumbawa).**

Selain itu, **terdapat keluhan atas errornya data penyaluran pada aplikasi SIKD NG** (Kab. Seruyan, Prov. Banten, Kota Subulussalam, Kab. Way Kanan, Prov. Bangka Belitung, Kab. Landak, Kota Lhokseumawe, Kab. Nagan Raya, Kab. Bandung Barat, Kab. Probolinggo, Kab. Karimun, Kota Bontang, Kab. Lebak, Kota Binjai, KPPN Kota Palembang, Kab. Kediri, Kab. Magelang, Prov. Jawa Barat, Kab. Landak, Kab. Mojokerto, Prov. Kalimantan Timur, KPPN Sukabumi)



Pengguna Layanan

78%

Pemerintah Daerah

155 Pengguna
(termasuk Anggota/ Pimpinan
DPRD dan Perangkat
Daerah/Desa)

9%

Kementerian/Lembaga

17 Pengguna
(Kementerian Teknis
dan Lembaga di dalam
dan luar Kemenkeu)

10%

Lainnya

20 Pengguna
(Masyarakat, Pendamping Desa,
Wartawan/ Media,
dan Swasta)

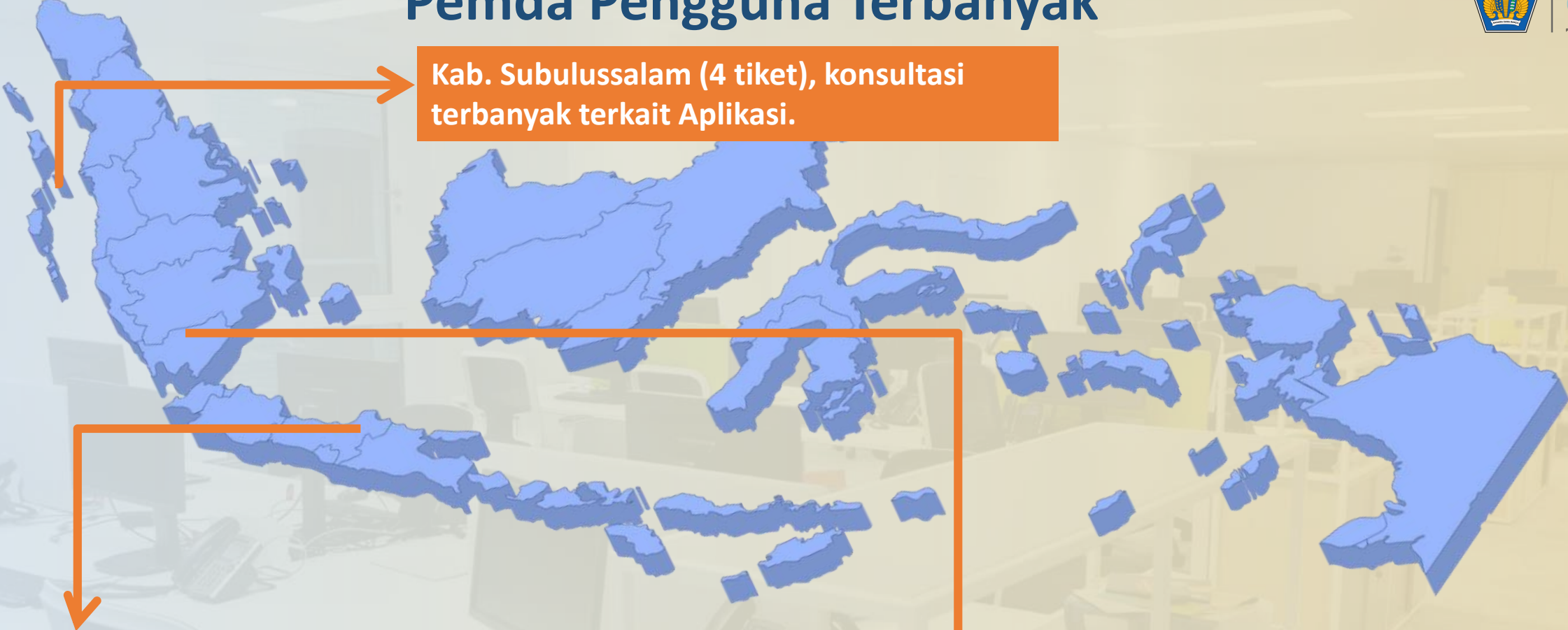
3%

Akademisi

6 pengguna
(Guru,Dosen,
Mahasiswa, dan
Siswa sekolah)



Pemda Pengguna Terbanyak

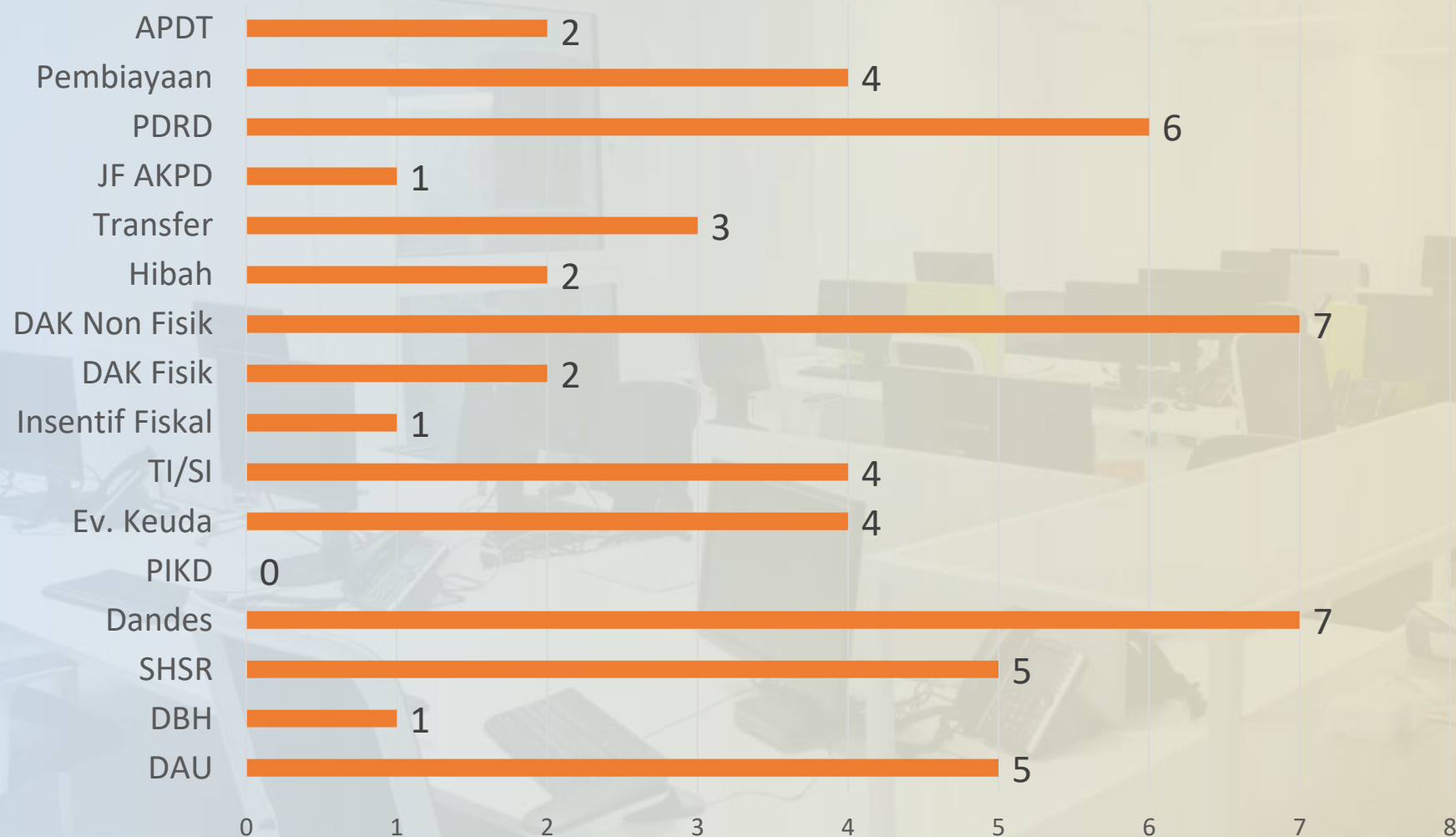


Kab. Subulussalam (4 tiket), konsultasi terbanyak terkait Aplikasi.

Kab. Demak (4 tiket), konsultasi terbanyak terkait Transfer.

Kab. Musi Banyuasin (4 tiket), konsultasi terbanyak terkait DBH.

Jumlah FAQ/Knowledge Base Contact Center DJPK yang Perlu Di-review



**Data diperoleh dari FAQ bulan 3 (tiga) bulan terakhir pada tautan <https://bit.ly/FAQDJPK> berdasarkan isian pada kolom perbaikan.



Kepuasan Pengguna *Layer 1* (L1) DJPK



NADIA: ★★★★★
SANGAT BAIK



DIAN : ★★★★★
SANGAT BAIK



RISMA ★★★★★
SANGAT BAIK

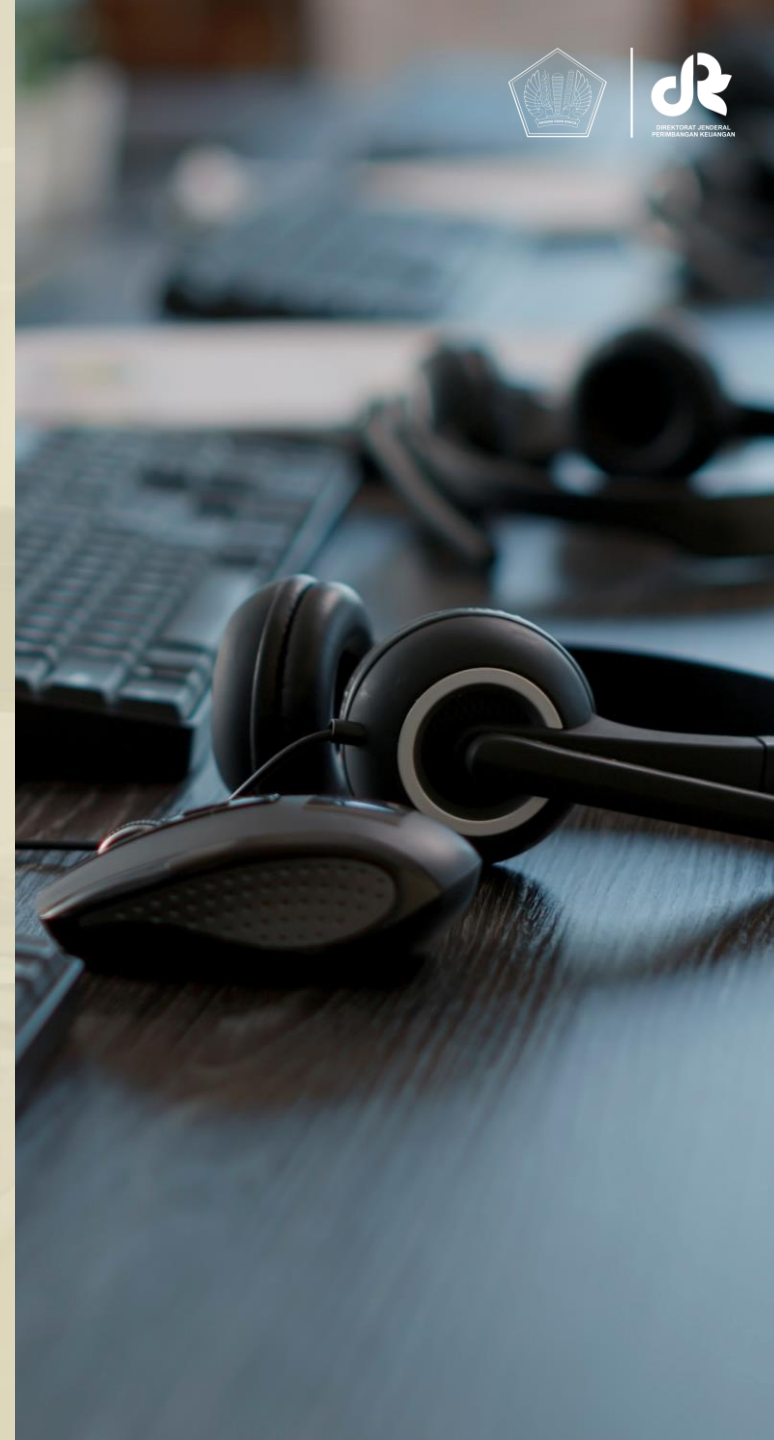


RONALD : ★★★★★
SANGAT BAIK



HORAS : ★★★★★
SANGAT BAIK

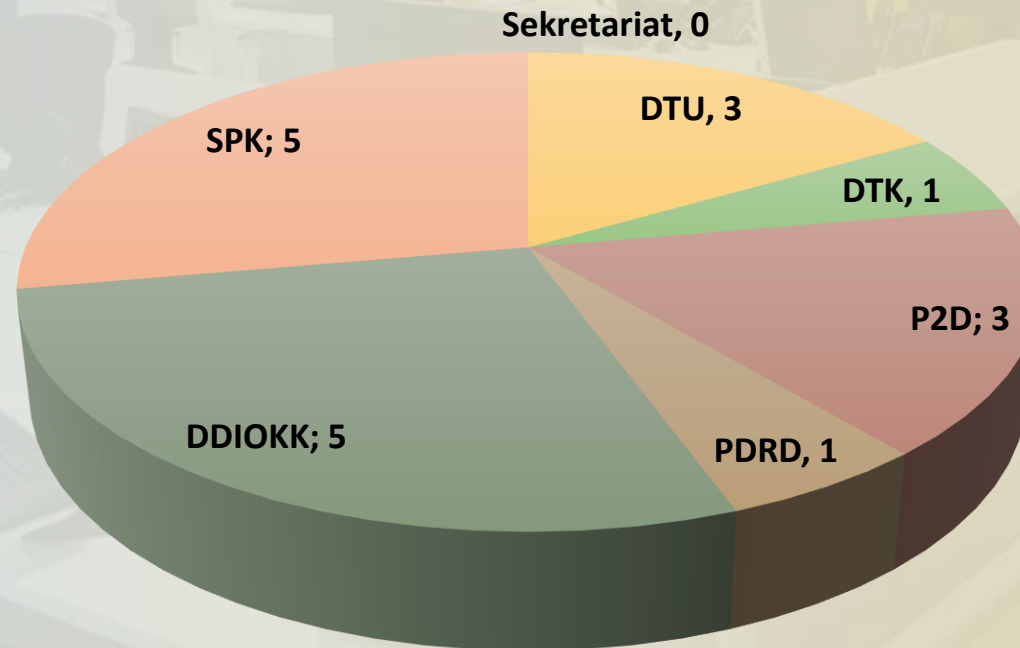
Penilaian Kepuasan Pengguna Layanan L1 DJPK menggunakan indikator *Customer Satisfaction Score* (CSAT) berdasarkan *feedback* yang diterima pada aplikasi CRM Deskpro.



Layer 2 (L2) Unit Teknis DJPK

Mulai Juli 2024, Layer 2 (L2) melibatkan seluruh unit eselon II di lingkungan DJPK. Sejak 20 April 2026, Unit Teknis DJPK yang sebelumnya berperan sebagai L3 telah berubah menjadi L2 Unit Teknis DJPK. Apabila diperlukan eskalasi, Agent L1 DJPK dapat meneruskan ke Agent L2 Unit Teknis DJPK.

18 Tiket Dieskalasi via Aplikasi CRM Deskpro ke Layer 2 pada Mei 2026



Layer 2 (L2) Unit Teknis DJPK

**Subdirektorat Program
dan Manajemen Pengetahuan,
Direktorat Sistem Perimbangan
Keuangan**

#1

The Best Team Kategori Tim dengan Kinerja Waktu Respon Tercepat (Capaian *Respon Time*: 2 tiket dengan capaian waktu rata-rata 120)

Keterangan:

120 : Tanggapan tiket diberikan pada hari H dan H+1
100 : Tanggapan tiket diberikan pada H+2 dan H+3
80 : Tanggapan tiket diberikan setelah H+3

**Tim Reguler Pelaksanaan Dana Desa,
Direktorat Dana Desa, Insentif,
Otonomi Khusus, dan Keistimewaan**

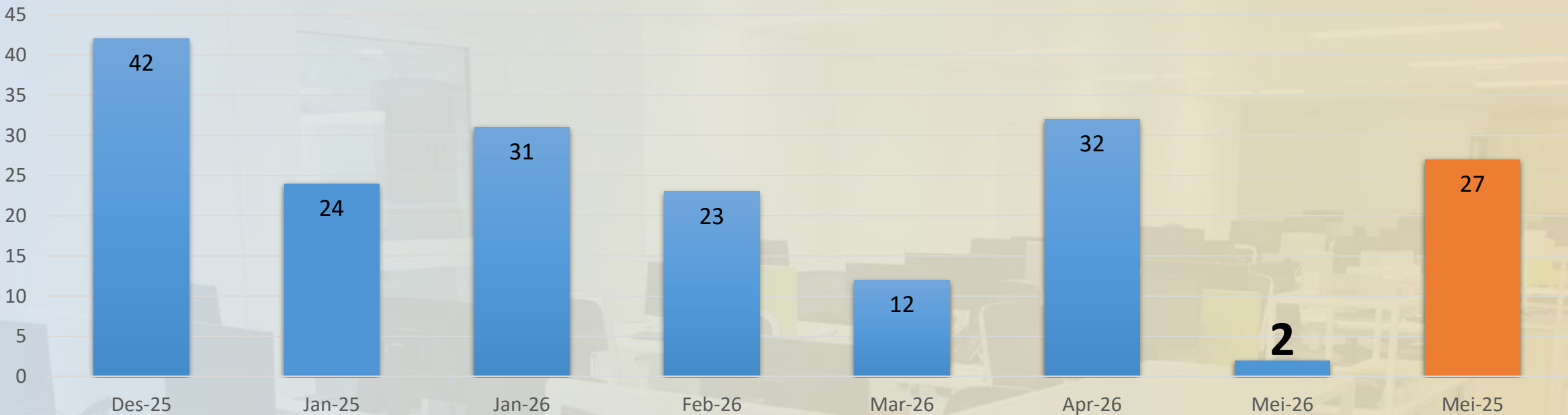
#1

The Best Team Kategori Tim dengan Kinerja Penanganan Tiket Terbanyak (Menangani 5 dari 18 tiket: 28%)

Pengelolaan Komunikasi dan Layanan Informasi melalui Konsultasi *Video Conference*/Tatap Muka



Layanan Konsultasi Tatap Muka

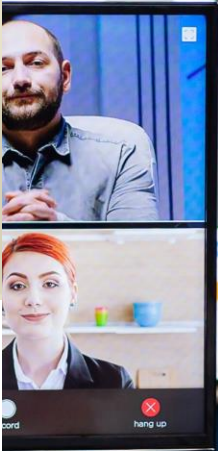
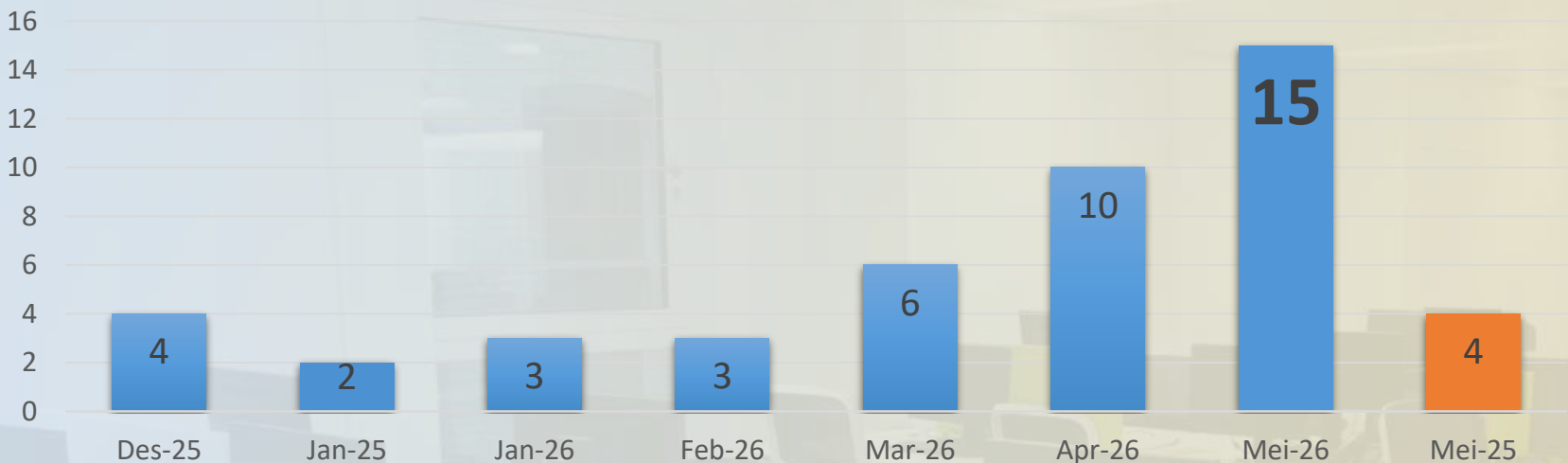


Dengan diimplementasikannya kebijakan konsultasi *full online* pada bulan Mei 2026, jumlah konsultasi tatap muka DJPK menurun signifikan. **Telah dilaksanakan 2 kali konsultasi tatap muka. Jumlah ini turun hingga 93% dibanding bulan sebelumnya (32), dan turun 92% dibandingkan April 2025 (27).**

Penurunan jumlah konsultasi tatap muka menunjukkan bahwa **mulai efektif mengalihkan pola layanan konsultasi dari mekanisme tatap muka menjadi berbasis daring.** Meskipun demikian, selama bulan Mei masih terdapat permohonan konsultasi tatap muka dari Pemerintah Daerah.

Daerah	Tanggal	Topik
Kab Kupang	12 Mei 2026	APBD
Prov Papua Selatan	12 Mei 2026	OTSUS

Layanan Konsultasi *Video Conference*



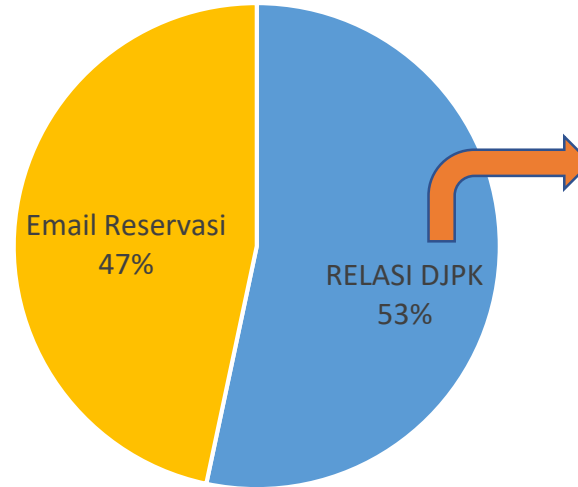
Pemerintah Daerah	Tanggal	Topik
BTN	5 Mei 2026	Pinjaman
Kota Bandar Lampung	6 Mei 2026	PDRD
Kab. Banjar	7 Mei 2026	DAK Fisik
Kab Muara Enim	7 Mei 2026	DBH
Kota Pare-Pare	8 Mei 2026	DAU
Kab. Kendal	12 Mei 2026	Belanja Wajib
Kab. Halmahera Selatan	19 Mei 2026	PDRD
Kab. Merauke	20 Mei 2026	DAK Fisik
Kota Bandar Lampung	21 Mei 2026	Pinjaman
Kab. Pangandaran	22 Mei 2026	DBH
Kota Ambon	22 Mei 2026	Pinjaman
Kab. Sumbawa	26 Mei 2026	PDRD
Prov. Riau	26 Mei 2026	DTU, DTK, dan IF
Kab. Bojonegoro	26 Mei 2026	Pinjaman
Prov. Kalimantan Timur	26 Mei 2026	Jafung

1. Seiring dengan implementasi kebijakan **konsultasi full online pada Mei 2026**, jumlah konsultasi melalui video conference mengalami peningkatan yang signifikan. Pada periode tersebut, telah dilaksanakan **sebanyak 15 kali konsultasi video conference melalui aplikasi Microsoft Teams**.
2. Jumlah tersebut **meningkat 50% dibandingkan bulan sebelumnya sebanyak 10 kali, serta meningkat 275% dibandingkan Mei 2025 yang tercatat sebanyak 4 kali**. Peningkatan ini menunjukkan adanya pergeseran pola layanan konsultasi dari tatap muka menuju layanan daring, sekaligus mencerminkan bahwa mekanisme konsultasi online mulai dimanfaatkan secara lebih optimal oleh pemerintah daerah.

Aplikasi Reservasi Layanan Konsultasi Online (RELASI DJPK)

1. Pada bulan Mei 2026, DJPK telah melakukan *launching* aplikasi **RELASI (Reservasi Layanan Konsultasi Online)** sebagai media resmi bagi Pemerintah Daerah dalam mengajukan permohonan konsultasi secara daring.
2. Aplikasi RELASI dapat diakses pada laman <https://djpk.kemenkeu.go.id> dengan memilih menu **Reservasi Layanan Konsultasi Online – Form Pendaftaran**.
3. Aplikasi ini dikembangkan untuk **mendukung pelaksanaan kebijakan konsultasi full online**, sehingga proses pengajuan, penjadwalan, verifikasi, dan pemantauan status konsultasi dapat dilakukan secara lebih tertib, transparan, dan terdokumentasi.

Kanal Masuk Konsultasi Online



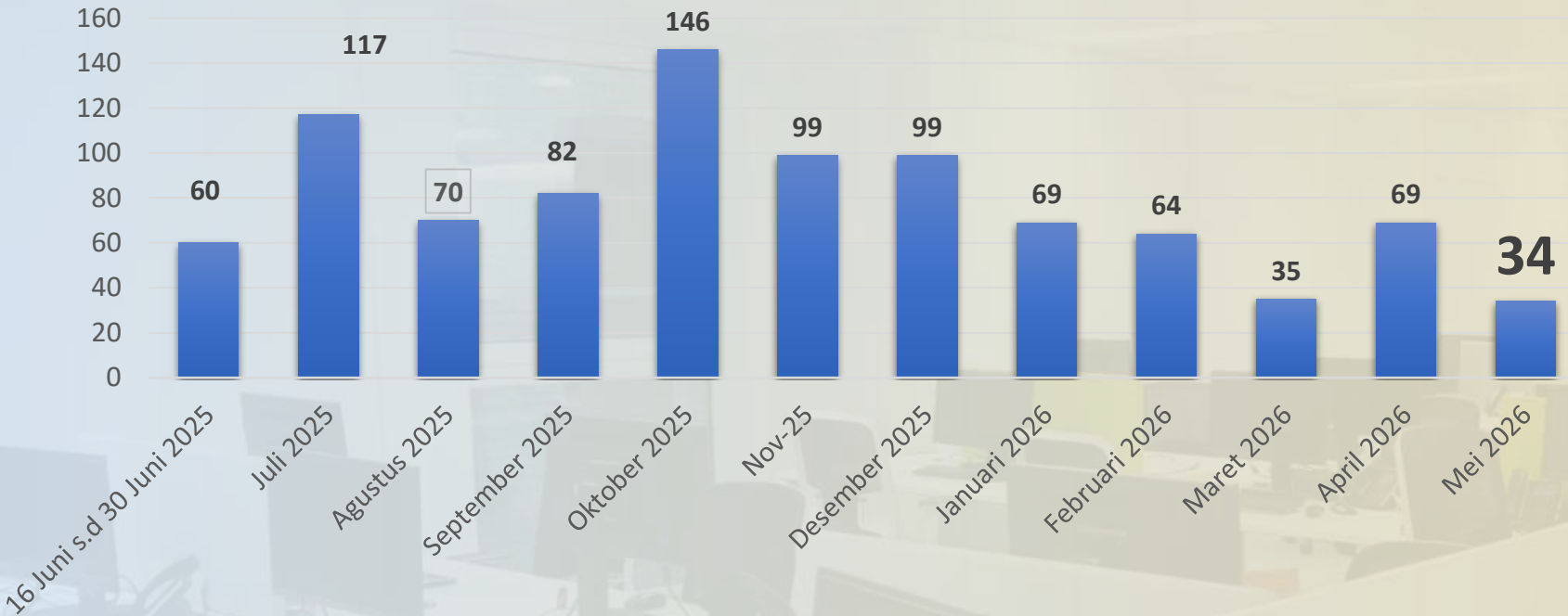
Status Permohonan RELASI Bulan Mei	Jumlah
Selesai/Terlaksana	8
Dibatalkan	3
Total Permohonan RELASI	11

Pada Mei 2026, DJPK telah melaksanakan **15 sesi konsultasi online**. Dari jumlah tersebut, **8 konsultasi atau 53%** telah diajukan melalui **aplikasi RELASI DJPK**, sedangkan **7 konsultasi atau 47%** masih masuk melalui **email reservasi**.

Secara khusus, terdapat **11 permohonan yang masuk melalui RELASI DJPK**, dengan rincian **8 permohonan terlaksana** dan **3 permohonan dibatalkan**. Kondisi ini menunjukkan bahwa RELASI mulai digunakan sebagai kanal resmi konsultasi, namun masih diperlukan penguatan komunikasi agar pemda lebih konsisten menggunakan aplikasi dibandingkan email.

Layanan Reservasi DJPK

melalui email reservasi.djpk@kemenkeu.go.id



1. Email Reservasi DJPK merupakan salah satu media penyampaian permohonan reservasi konsultasi DJPK (sebelum aplikasi tersedia)
2. **Jumlah email yang diterima s.d saat ini: 944 email** terkait permohonan konsultasi
3. Agent Layer 2 DJPK bertanggung jawab sebagai tim reservasi yang bertugas menerima, menanggapi, dan mengkoordinasikan permohonan konsultasi yang masuk.



Evaluasi Layanan Informasi



Pra-Single Point of Contact (SPOC) Contact Center DJPK



1. **Mulai 20 April 2026, CC DJPK telah menerapkan mekanisme layanan pra-SPOC** dengan menangani langsung kanal Telepon 134 (Ext. 4 “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) dan Whatsapp (081310004134). Adapun untuk kanal email dan live chat masih melalui Agen Kemenkeu PRIME. Penerapan mekanisme ini memungkinkan CC DJPK dan pengguna layanan dapat melakukan komunikasi dua arah dan diharapkan kepuasan layanan informasi DJPK semakin meningkat.
2. Adapun beberapa kendala yang dihadapi, adalah sebagai berikut.
 - a. Alur Bot Whatsapp Kemenkeu PRIME (untuk dapat berinteraksi dengan Agen DJPK harus melalui alur dan tahapan yang cukup panjang).
 - b. Pada kanal telepon mengalami kendala disebabkan beberapa telepon masuk menanyakan topik terkait LPDP (ext 4 sebelumnya menu LPDP).
 - c. Terdapat kendala teknis pada aplikasi Deskpro (kanal email dan live chat) sesuai dengan ND Kabiro KLI nomor ND-640/SJ.6/2026 hal Penyampaian Kondisi Gangguan Aplikasi Deskpro dan Pengelola Keberlangsungan Layanan dan Sociomile (untuk kanal whatsapp mengalami beberapa kali assignment bot error).
3. Berkenaan dengan kendala tersebut, pada tanggal 20 Mei 2026 telah diselenggarakan rapat pembahasan bersama Biro KLI, dan disepakati akan dilakukan upaya penyederhanaan alur bot WhatsApp dimana untuk terhubung dengan agent DJPK cukup memilih menu 4 (katalog layanan dan konfirmasi topik perimbangan keuangan pusat daerah).
4. Selanjutnya, DJPK terus melakukan evaluasi atas layanan Contact Center di masa Pra-SPOC untuk perbaikan ke depan.

Evaluasi Layanan Konsultasi DJPK *Full Online*

Pada bulan Mei 2026, telah diberlakukan kebijakan Layanan Konsultasi *Full Online*, dengan evaluasi sebagai berikut.

1. Implementasi layanan *konsultasi full online* mulai efektif menggeser pola layanan dari tatap muka ke daring. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan konsultasi tatap muka menjadi 2 kali pada Mei 2026 dan 1 kali pada Juni 2026, sementara konsultasi video conference meningkat menjadi 15 kali.
2. Masih banyaknya Pemda yang mengajukan permohonan konsultasi melalui email reservasi, atas hal itu agent DJPK selalu mengarahkan Pemda untuk melakukan reservasi melalui RELASI. Ke depan perlu penguatan sosialisasi kepada stakeholder DJPK.
3. Untuk jangka panjang, Fitur RELASI akan menggunakan layanan berbasis *Customer Relationship Management* (CRM) Kementerian Keuangan.

Transformasi Layanan Konsultasi DJPK menuju *Full Online*

Pada bulan Mei 2026, dalam rangka implementasi kebijakan Layanan Konsultasi *Full Online*, kami telah melakukan beberapa upaya antara lain:

1. **Memutakhirkan SOP** Penjadwalan, Pelaksanaan, dan Dokumentasi Layanan Konsultasi DJPK.
2. **Membuat dan mengembangkan aplikasi RELASI (Reservasi Layanan Konsultasi Online) dalam website DJPK** sebagai media resmi bagi Pemerintah Daerah dalam mengajukan permohonan konsultasi secara daring.
3. **Melakukan penyebaran informasi / *blast* Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan No. S-41/PK/2026 Tanggal 21 April** kepada seluruh *stakeholder* DJPK perihal Pemberitahuan Mekanisme Layanan Konsultasi DJPK.
4. **Mempublikasikan konten** terkait Mekanisme Layanan Konsultasi DJPK dan **video tutorial tata cara pelayanan RELASI** melalui konten Instagram DJPK.
5. **Sosialisasi kepada Seluruh Direktorat terkait Mekanisme Layanan Reservasi Konsultasi Online pada Senin 4 Mei 2026 dan Informasi ke seluruh Kanwil DJPb melalui ND Seditjen**
6. **Menyelenggarakan rapat** Pembahasan Mekanisme dan Dukungan dalam Pelaksanaan Layanan Konsultasi Online DJPK dengan melibatkan Subdirektorat PMP DJPK.
7. **Menyediakan media** dalam rangka pendokumentasian layanan konsultasi DJPK.



TERIMA KASIH

**Bersama, Kita Tingkatkan Layanan
Publik yang Lebih Baik**

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1
Jakarta Pusat 10710
Gedung Radius Prawiro

